

DAFTAR PUSTAKA

- Agostiono. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses 5 September 2010.
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. 2008. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya." *Jurnal Baca*, Universitas Peparari Makassar
- Amrullah, A. (2020). *Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Di Kecamatan Kapuas Timur*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Artana, I. (2014). *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung*. (Doctoral dissertation, Universitas Warmadewa).
- Azhar, A. K. (2016). *Hubungan Perilaku Birokrasi Dengan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung*. (Doctoral Dissertation, Perpustakaan).
- Edward III, George C. 1984. *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc, London England.
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 143.
- Ismail, Y. L. (2015). *Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Gorontalo*. Penelitian Kolaboratif Dana BLU FE, 1(1981).
- Nakamura, Robert T & Frank Smallwood. 1980. *The Politics of Policy Implementation*. St. Martin Press, New York.
- Nasution, S. R. (2018). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Sail Kota Pekanbaru*. *Jurnal Niara*, 10(2), 72-77.
- Nubatonis, S. E., Rusmiwari, S., & Suwasono, S. (2015). *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1).
- Pontius, A. L. *Pengaruh Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe*. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1062.
- Prasetyo, D. D. (2018). *Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Bersubsidi (Studi Di Puskesmas Kecamatan Jambesari*

- Kabupaten Bondowoso*). (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Jember).
- Quade, E.S. 1984. *Analysis For Public Decisions*. Elsevier Science Publishers, New York.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press*. Chicago-Illionis.
- Rumengan, F., Tulusan, F., & Londa, V. (2020). *Kualitas Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah Di Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(85).
- Sabatier, Paul. 1986. "Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research." *Journal of Public Policy* 6, (Jan), h. 21-48.
- Sabrina, N. (2018). *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Di Bidang Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 108-114.
- Selamat, M. D. (2013). *Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)*. *Governance*, 5(1).
- Sellang, K., & Useng, A. (2013). *Kualitas Pelayanan Publik terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur di Kantor Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang*. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 2(1), 1-15.
- Sinambella. (2011). *Asas-asas pelayanan publik*. Bandung: Alfabeta
- Siti Maryam, N. (2017). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 6.
- Sofianti, M., Malik, I., & Parawu, H. E. (2021). *Responsivitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat Di Kantor Kepolisian Sektor Alla Kabupaten Enrekang. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*. (KIMAP), 2(4), 1158-1175.
- Subarsono, A. G. (2021). *Bab 4 Pelayanan Publik Yang Efisien, Responsif, Dan Non-Partisan*. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, 135.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Wicaksono, N. A. (2019). *Standar Pelayanan Administrasi Umum Pada Kantor Pemerintah Kecamatan Ngaglik*.

Wulan, S., & Asis, A. (2019). *Analisis Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene. Mitzal* (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, 3(2).

Undang-undang & Peraturan:

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
PERWALI Kota Malang Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Sumber Lain

Kridawati Sadhana.2015.Etika Birokrasi Pelayanan Publik. Malang:CV Citra Malang

<https://kecsukun.malangkota.go.id/>